



JURNAL

Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

POLITIK ORDE BARU: DAMPAK KURIKULUM 1975 PADA MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKAT SMA/SEDERAJAT

Silviana Damayanti*, Zulkarnain

silvianadamayanti.2023@student.uny.ac.id

Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo 1 Karangmalang, 55281, Indonesia.

Article history:

Received 20 Desember 2024; Revised 17 August 2025; Accepted 30 September ; Published 15 October

Abstract: The 1975 curriculum can be said to be the beginning of a foundation in Indonesian curriculum development that applies educational theory and system development. The 1975 curriculum change is a improvement of the previous curriculum, eventhough this curriculum still has many shortcomings. Curriculum changes often being influenced by developments in science and technology and the needs of society, also the political conditions of the country. Likewise, the 1975 curriculum cannot be separated from the political influence of the New Order regime which is quite dominating in did many things to get rid of the legacy from the Old Order period. The political influence in the 1975 curriculum is very evident in the subject matter of history at the high school / equivalent level. This research using historical research methods through five stages, namely topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. Thus, it can be seen that the politics of the New Order had an impact on the position of history subject which initially stood alone, then combined in the Social Science (IPS) subject. History learning in the 1975 curriculum in its implementation was less than optimal, so it received criticism from President Soeharto for the lack of building historical awareness. It also lead to the invention of Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Keywords: New Order; 1975 curriculum; history subject.

Abstrak: Kurikulum 1975 dapat dikatakan sebagai dasar dalam perkembangan penyusunan kurikulum Indonesia yang menerapkan teori pendidikan dan pedekaran sistem. Perubahan kurikulum 1975 merupakan penyempurna bagi kurikulum sebelumnya meskipun kurikulum ini masih banyak kurangnya. Pergantian kurikulum sering terjadi selain dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat, juga dipengaruhi kondisi politik negara. Begitu juga kurikulum 1975 tidak lepas dari pengaruh politik masa Orde Baru yang cukup mendominasi dalam membersihkan warisan Orde Lama. Pengaruh politik dalam kurikulum 1975 sangat tampak pada materi mata pelajaran sejarah tingkat SMA/ sederajat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, melalui lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa politik Orde Baru berdampak pada posisi mata pelajaran sejarah yang awalnya berdiri sendiri

kemudian digabungkan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pembelajaran sejarah pada kurikulum 1975 dalam pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga mendapatkan kritik dari Presiden Soeharto karena kurangnya membangun kesadaran sejarah. Ini juga mengantarkan pada dicetuskannya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Kata kunci: Orde Baru; kurikulum 1975; mata pelajaran sejarah.

PENDAHULUAN

Pendidikan yaitu proses interaksi satu sama lain antara pendidik dan peserta didik untuk menjadikan manusia yang berpikir secara arif dan bijaksana. Sehingga pendidikan menjadi aspek yang mendapat perhatian dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Alfian, 2011). Untuk mewujudkan tujuan tersebut hal yang harus diperhatikan ketika merancang kurikulum ialah penataan dan posisi mata pelajaran tiap jenjang pendidikan (Ritonga, 2018). Keberadaan kurikulum sebagai jantung dunia pendidikan, mengalami beberapa kali penyempurnaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada awal kemerdekaan masa orde lama dan orde baru, kurikulum pendidikan di Indonesia sering mengalami perubahan dan pergantian (Zulkarnain, 2018).

Pergantian kurikulum yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan perubahan di masyarakat, dan membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik (Wibowo et al., 2023:82). Perubahan kurikulum juga dapat mempengaruhi sebagian mata pelajaran, khususnya sejarah. Keberadaan pembelajaran sejarah mampu membentuk dan mengembangkan sikap serta moralitas generasi muda bangsa. Hal ini terjadi karena melalui pembelajaran sejarah mereka dapat memahami proses lahir dan berkembangnya bangsa, mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa lalu, untuk dijadikan pedoman di masa kini dan yang akan datang (Hasan, 2008). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Leo Agung (2015) dalam Pratama & Hidayat (2022) bahwa posisi mata pelajaran sejarah terus mengalami perubahan seperti pergantian nama, mulai dari Sejarah, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum.

Pada tahun 2020 masyarakat Indonesia dihadapkan pada isu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan menyederhanakan kurikulum dan asesmen nasional. Salah satunya bagian sosialisasi tersebut mengungkapkan tentang ketidakwajiban peserta didik di tingkat SMA/ sederajat untuk mengambil mata pelajaran sejarah. Bagi kelas 10 SMA/ sederajat mata pelajaran sejarah digabung dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Carey, 2020). Dengan begitu, mata pelajaran tidak menjadi wajib dan tidak berdiri sendiri dalam tingkat SMA/ sederajat. Sehingga munculnya pertanyaan bagaimana jadinya jika mata pelajaran sejarah tidak diwajibkan bagi peserta didik.

Isu tersebut mendapat perhatian oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Peter Carey (2020) dalam artikelnya di laman Tirto, yang mengungkapkan bahwa keberadaan mata

pelajaran sejarah menjadi tidak wajib diberikan pada tingkat SMA/ sederajat akan berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Masyarakat yang tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri dan suatu bangsa akan hidup di bawah bangsa lain. Jika kebanyakan tulisan riset tentang sejarah Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri disusun bukan oleh orang Indonesia, hal ini menggambarkan bahwasanya Indonesia tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia internasional. Padahal menurut Carey (2020) keberadaan sejarah sangat penting dalam menentukan arah bangsa, contohnya ketika Sutan Syahrir berpidato di DK PBB pada 14 Agustus 1947 untuk membahas “*The Indonesian Question*”, untuk meyakinkan anggota DK PBB bahwa Indonesia memiliki status independen dalam sejarah yang diragukan pada saat itu. Pidato Syahrir tentang seribu tahun sejarah Indonesia dengan melihat ke masa lalu dan memberikan contoh kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sebagai pelopor dari Indonesia yang baru lahir, yang kemudian dari pidato tersebut memberikan jalan bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari anggota PBB.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui posisi mata pelajaran sejarah menjadi sangat penting selain dapat menjelaskan identitas diri juga tahu ke mana tujuan masa depan bangsa Indonesia. Hal lain juga diungkapkan Carey (2020) ketika diplomat Indonesia di PBB tidak percaya diri pada saat menyampaikan kebijakan pemerintah dalam tragedi Santa Cruz meletus di Dili, Timor Timor pada 12 November 1991. Bahkan PBB membiarkan pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh reporter asing, atas nama Indonesia. Sehingga dari sini sebenarnya dapat dilihat bahwa wawasan sejarah masa Orde Baru (1966-1998) mengalami penurunan, sehingga membuat individu kurang percaya diri sebagai suatu bangsa.

Dari permasalahan dan pernyataan di atas, kemudian timbul pertanyaan bagaimana posisi mata pelajaran sejarah pada masa orde baru, terkhusus pada kurikulum 1975 yang menjadikan mata pelajaran sejarah tingkat SMA tidak berdiri sendiri melainkan digabung dengan mata pelajaran IPS. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis mencoba membahas lebih lanjut politik Orde Baru yang berdampak pada kurikulum 1975 khususnya posisi mata pelajaran sejarah tingkat SMA/ sederajat, dan seberapa penting pembelajaran sejarah bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah oleh Kuntowijoyo (2013), di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi pembelajaran sejarah dalam kurikulum tahun 1975. Metode penulisan sejarah melalui beberapa tahap yaitu, pemilihan topik, pengumpulan data, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama pemilihan topik, topik dipilih karena adanya perubahan dalam kurikulum di Indonesia yang berdampak pada sebagai mata pelajaran, khususnya mata pelajaran sejarah pada kurikulum 1975 yang bukan lagi menjadi mata pelajaran berdiri sendiri melainkan digabung dalam pelajaran IPS. Sehingga penulis tertarik untuk

membahas lebih lanjut posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 pada tingkat SMA/ sederajat.

Tahap kedua yaitu heuristik (pengumpulan data), penelitian ini menggunakan data pustaka atau sumber tertulis dari buku, jurnal, artikel, dan *website* yang terpercaya. Setelah itu masuk tahap ketiga verifikasi, yaitu kritik sumber untuk mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan. Kemudian tahap interpretasi, yaitu penggabungan fakta-fakta yang telah dianalisis. Tahap terakhir historiografi, menyusun dan merangkai hingga menjadi kajian yang diwujudkan dalam bentuk artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh politik yang bersifat sentralistik, yang menekankan pada aspek pembangunan ekonomi yang didukung oleh kalangan pemerintah, militer, dan konglomerat (Jailani and Muhammad, 2019). Pada awal tahun 1970-an, dalam upaya membangun kekuatan politik, kekerasan merupakan jalan utama yang digunakan pemerintah Orde Baru. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas politik, sehingga beberapa badan intelijen dibentuk untuk mengawasi masyarakat, salah satunya pembentukan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) yang diisi oleh masyarakat sipil, institusi pendidikan seperti Lembaga Sandi Negara, serta Jaksa Agung Muda bidang intelijen (Farchan, 2022).

Politik Orde Baru bersifat partikularistik yang bertujuan untuk melegitimasi otoriterisme. Partikularistik misalnya dalam pengertian Demokrasi Pancasila, Hak Asasi Manusia, tanggung-jawab warga negara, dan lainnya. Pengertian tersebut mempermainkan standar moral yang seharusnya, sehingga dapat mengontrol persepsi dan pola pikir masyarakat (Farchan, 2022). Kebijakan politik masa Orde Baru memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam aspek pendidikan (Hartono, 2016). Hal tersebut selaras dengan ungkapan Miriam Budiardjo dalam Sarnoto (2012), bahwa politik tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dan kebijakan umum, melainkan mencakup kegiatan yang bertujuan membawa perubahan dalam struktur masyarakat seperti pergantian politik dari suatu rezim.

Kebijakan politik masa Orde Baru juga tercermin dari cara dalam membersihkan unsur PKI dan Soekarno dalam birokrasi pemerintahan (Farchan, 2022). Kebijakan politik tersebut mempengaruhi sistem pendidikan nasional pada saat itu, dimana sekitar tahun 1969-1970 diadakan PPNP (Proyek Penilaian Nasional Pendidikan) dan menemukan permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi pendidikan (Hartono, 2016). Muatan kurikulum di masa Orde Baru juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tujuan penyelenggaraan kekuasaan (Sarnoto, 2012). Oleh karena itu, kebijakan politik Orde Baru berdampak pada sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralis. Semua keputusan dan kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menolak. Sehingga masyarakat didoktrin untuk patuh pada kebijakan pemerintah, yang dapat menghambat daya

kreatifitas, inovasi, dan kritis. Dengan demikian, sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang secara eksplisit muncul pada pelita I hingga V.

Penerapan Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 dibentuk karena dilatar belakangi oleh beberapa hal menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Syarif Thajeb dalam Wibowo et al (2023:87-88), yang di antaranya: (1) Kebijakan Pelita I yang dimulai tahun 1969, yang banyak menimbulkan gagasan baru dalam sistem pendidikan nasional. (2) Kebijakan pemerintah yang telah dicantumkan dalam GBHN yang berbunyi “mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan”. (3) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong pemerintah meninjau kembali pendidikan nasional. (4) Masuknya inovasi pembelajaran yang efisien dan efektif dalam pendidikan di Indonesia. (5) Tinjauan kembali dalam kurikulum sebelumnya 1968 agar sesuai dengan keinginan masyarakat.

Perencanaan dan pengembangan kurikulum 1975 menggunakan pendekatan rasional atau kemudian dikenal dengan pendekatan yang memusatkan pada tujuan. Sehingga kurikulum ini memfokuskan pada materi yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Struktur kurikulum ini meliputi kategori program kurikulum, perbandingan bobot pada bidang studi (nama ganti mata pelajaran) untuk tiap tingkatan, dan mengurutkan penyajian bidang studi dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang sifatnya kontinuitas (Soedijarto et al., 2010:8). Dalam perencanaan kurikulum ini, kemampuan (kecerdasan dan keterampilan), sikap, dan pengetahuan dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum ini mengenal tingkat tujuan pendidikan, yaitu: tujuan institusional (tujuan umum yang harus dicapai pihak sekolah), tujuan kurikuler (tujuan yang dicapai melalui program dalam bidang studi), dan tujuan instruksional (tujuan tiap satuan bidang studi) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).

Agar kurikulum 1975 berjalan secara fungsional dan efektif, setiap pendidik diharuskan untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengemabngan Sistem Intruksional), yang dirancang secara sistematis. Tujuan utama PPSI ialah untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara spesifik dan dapat diukur. Tujuan yang spesifik memungkinkan guru untuk menyusun materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sementara tujuan yang dapat diukur membantu pendidik dalam menilai keberhasilan dari proses pembelajaran. Kurikulum ini berpusat pada tujuan, sehingga setiap pendidik diharuskan memahami dengan utuh tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).

Kurikulum 1975 dirancang dan disusun secara sistematis untuk setiap bidang studi dalam buku pedoman kurikulum 1975 yang meliputi penjelasan, prinsip dasar, ruang lingkup, pendekatan, metode, perlengkapan pengajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Dalam

penyusunan kurikulum 1975 menggunakan prinsip dasar yang dimuat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976), meliputi: (1) Prinsip fleksibilitas program, kemampuan untuk menyediakan fasilitas. (2) Prinsip efisiensi dan efektifitas, alokasi waktu yang diterapkan selama seminggu ialah 36 jam bukan 42 jam, jadi jam padat perta didik ditekanka pada hari senin hingga jumat, sedangkan kegiatan yang lebih santai dilakukan pada hari sabtu. Jam pelajaran yang semula diberikan 1 jam untuk satu minggu tiap program studi, diganti menjadi 2 jam maksimal 3 jam dalam satu minggu. (3) Prinsip berorientasi pada tujuan, di mana tujuan yang menjadi capaian peserta didik harus direncanakan lebih awal, daripada menentukan pembagian jam dan bahan pembelajaran. (4) Prinsip kontinuitas, bahwasanya pendidikan berlangsung sepanjang hayat sehingga sekolah harus membangun hubungan yang fungsional hirarkis antara pelajaran yang diberikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. (5) Prinsip pendidikan seumur hidup, bahwa sekolah bukan menjadi satu-satunya tempat bagi setiap manusia belajar, namun sebagian waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup. Namun, dapat kita ketahui bersama bahwa sekolah menjadi tempat strategis dalam membina generasi bangsa.

Bidang studi kurikulum 1975 terbagi menjadi beberapa kategori meliputi bidang studi pendidikan agama, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, ilmu pengetahuan alam, matematika, kesenian, keterampilan, olah raga dan kesehatan. Evaluasi pada kurikulum 1975 melalui penilaian tugas resitasi, kerja kelompok, diskusi (*panel discussion, lecture discussion*, dan metode diskusi lainnya), sosio drama, karya wisata, dan uji praktikum. Pendidik juga harus memperhatikan dalam penyusunan penilaian dalam aspek kognitif dan afektif yang hendak diukur. Dalam hal ini diharapkan pendidik juga bersedia melatih diri secara terus menerus dan mempelajari lebih lanjut tentang *taxonomy, item writing, item analysis, scoring* dan statistik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975). Dalam kurikulum 1975 juga diterapkan suatu metode evaluasi formatif (ulangan harian) dan evaluasi sumatif (ulangan akhir semester) atau disebut dengan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir), di mana proses evaluasi tersebut berada pada wewenang sekolah. Dengan adanya sistem tersebut, terdapat sekolah yang mudah memberikan kelulusan, tetapi juga ada sekolah yang sulit memberi keleulusan bagi peserta didik. Dengan begitu, berakibat pada rentang kualitas pendidikan antar sekolah menjadi lebar (Tasnur, Mondong and Manay, 2022).

Penilaian kurikulum 1975 dilaksanakan oleh pendidik setiap akhir pembelajaran, hal tersebut menjadi salah satu perbedaan antara sistem evaluasi kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya. Para pendidik diharuskan melakukan penilaian pada akhir pembelajaran. Kemudian, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan ini dipengaruhi oleh konsep MBO (*Management By Objective*) yang diukur sesuai dengan tujuan. Dengan begitu, pendekatan, metode, bahan ajar, dan tujuan pengajaran tertera dalam PPSI atau yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi: Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi (Maula et al., 2021).

Dampak Kurikulum 1975 pada Mata Pelajaran Sejarah Tingkat SMA/Sederajat

Perubahan kurikulum membawa pengaruh bagi pembelajaran sejarah, karena pada kurikulum 1975 menggunakan pendekatan *integrated* yaitu menggabungkan pelajaran dalam satu rumpun. Oleh karena itu, mata pelajaran sejarah tidak lagi berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ruang lingkup bidang studi IPS dalam tingkat SMA/ sederajat mencakup: Pendidikan Moral Pancasila, Sejarah, Geografi, Antropologi, dan Ekonomi. Dalam buku pedoman kurikulum 1975 yang dirancang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975), disebutkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran IPS membahas manusia dengan lingkungannya dari sudut pandang ilmu sosial, politik, ekonomi, budaya, sejarah, dan geografi. Objeknya ialah pusat-pusat kegiatan hidup manusia. Selain itu, pendidikan moral pancasila tidak hanya menjadi beban pada mata pelajaran pendidikan moral pancasila, tetapi juga dibebankan pada pelajaran IPS (sejarah, geografi, ekonomi).

Tujuan dari pengelompokan mata pelajaran dalam satu rumpun ialah untuk menyederhanakan disiplin ilmu yang banyak dan merampingkan pelajaran. Namun, dampaknya porsi tiap mata pelajaran harus dibagi dengan disiplin ilmu lainnya. Alokasi waktu dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA diterapkan pada program IPS di kelas 10 dan 11, serta program bahasa di kelas 12. Mata pelajaran sejarah tingkat SMA kelas 10 dua semester dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran/minggu, menempati posisi sebagai mata pelajaran inti yang meliputi materi sejarah nasional dan dunia (Fikriansyah, 2020). Depdiknas (1995) dalam Zulkarnain (2017) untuk kelas 11 mata pelajaran sejarah diterapkan dalam dua semester dengan 3 jam pelajaran/minggu, sedangkan untuk kelas 12 mata pelajaran sejarah ditadakan. Pada program bahasa, mata pelajaran sejarah diterapkan pada kelas 12 selama dua semester dengan 7 jam pelajaran/minggu.

Pada perencanaan kegiatan pembelajaran bidang studi IPS dalam mata pelajaran sejarah, terdapat rencana sekolah yang direncanakan seperti, kunjungan ke Taman Pahlawan, menghadiri upacara 17 Agustus, dan peringatan hari besar Nasional lainnya. Kemudian pada perkengkapan pengajaran pendidik harus menyiapkan alat peraga atau alat bantu mengajar, seperti gambar Pangeran Diponegoro, Pattimura, dan tokoh pahlawan lainnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975). Namun, pada praktiknya, mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 dinilai kurang berhasil dalam menanamkan dan memperkuat semangat perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, penerapan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 mendapat kritik oleh Presiden Soeharto, dan menganggap perlu adanya penataan dalam kurikulum pengajaran sejarah di sekolah sebagai penanaman nilai perjuangan Bangsa Indonesia (Zulkarnain, 2017).

Keberadaan kurikulum 1975 tidak mungkin lepas dari pengaruh politik, dan mata pelajaran yang paling strategis dalam keterlibatan politik ialah mata pelajaran sejarah. Apalagi kurikulum 1975 berjalan ketika masa Orde Baru yang ingin menghilangkan pengaruh pemerintah Orde Lama dengan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, Agama, dan Komunis). Pada tahun 1966 hingga 1980 ialah tahun yang membuat perancangan pemerintahan baru, di mana rakyat harus patuh

dan menerima perintah yang dikeluarkan oleh Presiden (Zulkarnain, 2017). Salah satu contoh adanya pengaruh politik pada kurikulum 1975 ialah dapat dilihat pada buku teks sejarah karangan G. Mujanto yang berjudul Sejarah Indonesia 2B. Dalam buku teks tersebut secara tidak langsung melebeli sikap kurang baik pada diri Soekarno, misalnya mengatakan bahwa “Soekarno hanya omong kosong dan tidak punya rasa malu”. Sementara posisi Soeharto lebih ditonjolkan peran besarnya dalam Orde Baru (Marlina, 2019).

Menurut Umasih (2000) pengajaran pendidikan pada kurikulum 1975 dianggap gagal dalam membentuk kesadaran sejarah, menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme bagi peserta didik serta generasi muda secara umum, karena tujuan kurikulum 1975 berfokus pada pembentukan visi keilmuan, namun kurang berpusat pada tujuan pembentukan nilai yang tercakup pada mata pelajaran sejarah. Adanya perkembangan dinamika politik masyarakat ikut mempengaruhi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat ideologi politik dan hegemoni kekuasaan. Pada perkembangannya, kurikulum 1975 kemudian diganti dengan kurikulum 1984 yang menghadirkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang termuat dalam GBHN.

SIMPULAN

Jalannya pendidikan pasti memiliki tantangan tersendiri dan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang sedang terjadi. Kurikulum 1975 menunjukkan bahwa perubahan pendidikan pada masa Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik pemerintah. Penggabungan mata pelajaran sejarah ke dalam IPS membuat ruang belajar sejarah menjadi lebih sempit dan kurang mampu membangun kesadaran sejarah peserta didik. Selain itu, pendekatan kurikulum yang sangat berorientasi pada tujuan menyebabkan guru terbebani oleh administrasi dan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif. Pengaruh politik Orde Baru juga terlihat pada penekanan materi sejarah yang berpihak pada kepentingan rezim. Namun, karena fokus sejarah lebih ke keilmuan, kondisi ini membuat pembelajaran sejarah dinilai kurang berhasil dalam menumbuhkan pemahaman dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga mendorong lahirnya kebijakan baru seperti PSPB pada kurikulum berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, M. (2011) ‘Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi’, *Khazanah Pendidikan: Journal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), pp. 1–8. Available at: <https://www.neliti.com/publications/144519/>.
- Carey, P. (2020) *Apa Akibatnya Jika Mapel Sejarah Dihapus dari Kurikulum Nasional?*, *tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/apa-akibatnya-jika-mapel-sejarah-dihapus-dari-kurikulum-nasional-f4XK> (Accessed: 1 December 2024).
- Farchan, Y. (2022) ‘Dinamika Sistem Politik Otoriterisme Orde Baru’, *Jurnal Adhikari*, 1(3), pp. 152–161. Available at: <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>.

- Fikriansyah, M. (2020) *Kurikulum 1975 dan Tersingkirnya Sejarah*, Kompasiana. Available at: <https://www.kompasiana.com/fakhriansyah/5f07f346d541df07002b2355/>.
- Hartono, Y. (2016) 'Pendidikan dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)', *Jurnal Agastiya*, 6(1), pp. 274–282. Available at: <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/879/792>.
- Hasan, S.H. (2008) *Problematika Pendidikan Sejarah*. Pendidikan Sejarah: UPI.
- Jailani, M.S. and Muhammad, M. (2019) 'Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997)', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), pp. 15–26. Available at: <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>.
- Kuntowijoyo (2013) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- 'Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran' (1976) in *Buku 1 (Ketentuan-ketentuan Pokok)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- 'Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) 1975: Pedoman Pelaksanaan Kurikulum' (1975) in *III A1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marlina (2019) 'The Influence of Zeitgeist on Historical Content in High School History Textbooks Curriculum 1975-2004', *Indonesian Journal of History Education*, 4(1), pp. 35–46.
- Maula, I. et al. (2021) *Kurikulum Pendidikan*. Sumatera Barat: Azka Pustaka.
- Pratama, F. and Hidayat, A. (2022) 'Penerapan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Pendidikan Era Presiden SBY 2004-2014', *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 10(1), pp. 47–62. Available at: <https://doi.org/10.24127/hj.v10i1.3507>.
- Ritonga, M. (2018) 'Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi', *Blna Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), pp. 88–102. Available at: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1277649>.
- Sarnoto, A.Z. (2012) 'Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia', *Journal on Education*, 1(1), pp. 30–31. Available at: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/540/>.
- Soedijarto et al. (2010) *Sejarah Pusat Kurikulum*. Kementerian Pendidikan Nasional. Available at: http://staffnew.uny.ac.id/upload/198503272014042001/pendidikan/Sejarah_kurikulum.pdf.
- Tasnur, I., Mondong, T.I. and Manay, H. (2022) 'Ujian Nasional: Sejarah Dan Dinamika Perkembangan Evaluasi Akhir', *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 18(2), pp. 80–87.
- Umasih, A.G. (2000) *Sejarah Pendidikan di Indonesia : Sebuah Telaah atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 1975-1994*. Universitas Indonesia.
- Wibowo, B.A., Pranowo, T.A. and Febrianto, A. (2023) *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: UPY Press.
- Zulkarnain (2017) *Kebijakan Kurikulum Sejarah di Sekolah Menengah Atas*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zulkarnain (2018) 'History Education Curriculum Policy Mass Reform in High School', *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 14(2), pp. 1–17. Available at: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/21153>.